

NO	URUSAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WASTE MANAGEMENT DAN KEBERSIHAN											
10	pertanahan	1	Pemeriksaan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan: -Pemeriksaan tanahnya diatas izin lokasi dipaparkan -Luas izin lokasi yang di urusikan *	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi seluruh luas tanah yang di berikan izin lokasi	x 100 %						
							4	Tertaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bernilai selimbang	Ada/Tidak		
							5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak		
							6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/Tidak		
							7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak		
							8	Tertaksananya pengawasan keamanan pangan secara	Ada/Tidak		
							1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan-jumlah surat pencairan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (dikalk absen/hanya) Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	x 100 %	
							2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Objek Landreform yang berstatus dari Tanah Maksimal Maksimum/ Absentee dan Daftar Subjek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subvek	x 100 %	
							3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subvek	x 100 %	
							4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dinonhon dalam 1 tahun	x 100 %	
							5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	x 100 %	

11

NO	URUSAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WADUK NON PELAYANAN DASAR											
		2	Persentase pendataan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100 % Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum							
		3	Tersedianya lokasi pendirian dalam rangka pemukiman model	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan petunjuknya di atas izin lokasi x 100 % Luas izin lokasi yang diterbitkan							
		4	Tersedianya Tanah Objek Landreform, (TOL) yang siap direhabilitasi yang berasal dari tanah kelebihan malstrum dan tanah Absentee	Jumlah Penerima Tanah Objek Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha x 100 % Jumlah Penerima Tanah Objek Landreform							
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah x 100 % Luas izin membuka tanah yang diterbitkan							
		6	Pemanganan sengketa tanah garapan yang di lakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani x 100 % Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan							
11	Langkungan Hidup	1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air ; IKD = Indeks Kualitas Udara; ITH = Indeks Tutupan Hutan			1	Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $NI_{tair} relatif = \frac{C_i}{C_{i0}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_1/C_{i0})^2 + (C_2/C_{i0})^2 + \dots + (C_n/C_{i0})^2}{n}}$ Rumus Metode IP : 0 < IP < 100 → baik (memenuhi baku mutu) 100 < IP < 500 → cukup layak 500 < IP < 1000 → cukup layak IP > 1000 → cukup layak IKU = 100 - (PM x 1000) x $\frac{PM}{100}$ ITH = 100 - [50/0,9 x (100 - 0,1)] dimana: IKU = Indeks Kualitas Tutupan Lahan -TH = Tutupan Hutan		

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : **Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Rumus	: $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diterbitkan izin lokasi}} \times 100\%$
Keterangan	: ▪ Yang dimaksud dengan luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi. ▪ Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya. ▪ Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha.

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform}} \times 100\%$	sda
	3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$	sda

		Kelebihan Maksimum/Absentee		
	4)	Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui-jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak}}{\text{jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}} \times 100\%$	sda
	5)	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik}}{\text{jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	sda

2) IKK Outcome :: **Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum**

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. ▪ Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal⁹

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya ▪ Yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah NKRI ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

4) IKK Outcome : Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee ^v

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luas yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan tanah objek landreform adalah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap ▪ Yang dimaksud dengan tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga

	▪ Yang dimaksud dengan tanah absentee adalah tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat penerima, luas tanah yang diberikan
--	--

5) IKK Outcome : Tersedianya tanah untuk masyarakat

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

6) IKK Outcome : Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. ▪ Yang dimaksud dengan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas.

	▪ Yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

NO	URUSAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WADUK P. JAWANAN BARAT											
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita ODG yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	x 100 %			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			
				Jumlah penderita ODG di kota				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	x 100 %			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota				Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	x 100 %			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terdindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terdindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)	x 100 %			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/kota (Ha)			
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)				Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/kota (m)			
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten/kota (Ha)				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten/kota (Ha)			
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)				Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS Kewenangan Kabupaten/kota (m)			
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)				Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/kota	Ada/Tidak		

NO	URUSAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WASTE PELAYANAN DASAR											
								Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak		
								Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah		
		2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kota (m)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota (m)			1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)			
							2	Perjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)			
							3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akses di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)			
							4	Perjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi erosi akses di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)			
							5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak		
							6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengaliran/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/Tidak		
							7	Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah		

NO	URUSAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WASTE PELAYANAN DASAR											
		3	Rasio luas daerah Irigasi Kewenangan kabupaten/kota yang diayani oleh jaringan irigasi primer dan sekunder	Luas Irigasi Kewenangan kab/kota yang diayani oleh jaringan irigasi primer dan sekunder (ha), dibagi dengan Luas daerah Irigasi Kewenangan kabupaten/kota (ha)	$\times 100\%$		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	$\times 100\%$	
							2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	$\times 100\%$	
							3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)	$\times 100\%$	
							1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/Tidak		
							2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/Tidak		
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota	$\times 100\%$		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM			
							4	Jumlah Ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM			
							5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.			

NO	URUBAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUBAN WADUK PELAYANAN DASAR											
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Jumlah rumah di kota x 100 %			1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S			
							2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			
							3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			
							4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyediaan lumpur tinja			
							5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja			
							6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik			
							7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar Σ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanid septik Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha x 100 %			
							8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman Σ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha x 100 %			
							9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Σ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Σ rumah di wilayah pengembangan SPALD T x 100 %			
							10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat Σ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S x 100 %			

NO	URUSAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
URUSAN WADIB PELAYANAN DAJAR												
6	Rasio Kepatuhan IMB kab/ kota	6	Rasio pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	Jumlah IMB yang berlaku	x 100 %		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Σ Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia Σ Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	x 100 %		
							12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Σ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia Σ Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	x 100 %		
							13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Σ Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD Σ Jumlah rumah yang diwajibkan dengan SPALD-T oada kab/kota	x 100 %		
							14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Σ Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot Σ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah oerembangan SPALD-S	x 100 %		
							1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Σ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku Σ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana)	x 100 %		
							2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting				
							3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak			
							4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak			
							5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	3 Bangunan telah ditetapkan melalui SK Walikota dan 10 Bangunan/Gedung lainnya masih dalam proses penetapan sebagai objek cagar budaya.			
							6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Terdapat 7 (tujuh) Aset Berupa tanah dan dimanfaatkan untuk kepentingan strategis daerah.			
							7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota				
							8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/diawat				

NO	URUSAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WADUK PULAYAN DAKAR											
		7	Tingkat Kematapan Jalan Kabupaten/kota	Panjang Jalan Kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) x 100 % Panjang Jalan Kesekeluruhan di wilayah kabupaten/kota				1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota 2 Panjang jalan yang dibangun 3 Panjang jembatan yg dibangun 4 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/tunggal) 5 Panjang jembatan yang diganti/dibebaskan 6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 7 Panjang jembatan yang direhabilitasi 8 Panjang jalan yang dipelihara 9 Panjang jembatan yang dipelihara			
		8	Rasio tenaga operator/tenaga/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota x 100 %				1 Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota 2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang memiliki sertifikat operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota 4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota			

NO	URUSAN	NO.	IRK Outcome	RUMUS/ PERBAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IRK Output	RUMUS/PERBAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WADIB PUCANGAN DASAR											
								Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN			
								Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			
								Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
								Tersedianya data dan profil OHO sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota			
								Tersedianya data dan informasi peletakan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diawasi oleh menteri yang membina jasa konstruksi, sosialisasi profesi, pengurusan tggal dan instalasi			
								Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis			
								Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota			
								Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota			
								Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen pemohonan IUK badan usaha dan TDUP yang disetujui			

NO	URUSAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WADUK PELAYANAN DAER											
								Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan keddikloesuan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
							15				
							16	Tersedianya data dan informasi keddikloesuan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
							17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan keddikloesuan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmen pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
							18	Jumlah badan usaha yang memiliki TUKN di wilayah kab/kota			
							19	Jumlah usaha perseroan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota			
							20	Jumlah badan usaha yang memiliki TUKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota			
							21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota			
							22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan TUKN badan usaha dan TDUP yang disertai			
							23	Jumlah pengawasan terkait keddikloesuan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
							24	Jumlah keddikloesuan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
							25	Jumlah pengawasan terkait keddikloesuan jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmen pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			

NO	URUSAN	NO.	IKK Outcome	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN	NO.	IKK Output	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
URUSAN WADUK PELAYANAN DASAR											
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	Dasar proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa melibatkan kementerian	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	x 100 %						
		1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	x 100 %			Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya Jumlah rumah yang terkena bencana alam Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/rekonstruksi sesuai dengan rencana aksi Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi Jumlah, lokasi dan luas pendanaan lahan Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
2			Facilitate penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemukiman kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemukiman daerah yang memenuhi kriteria penerima	x 100 %						

	jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	
--	---	--

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Yang dimaksud dengan kawasan permukiman rawan banjir adalah kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui Kabupaten/Kota dan peta Rawan Bencana pada Kawasan Permukiman. ▪ Yang dimaksud dengan infrastruktur pengendalian banjir meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain. ▪ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1) Luas permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda	sda
	3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	sda	sda
	4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg	sda	sda

		rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		
5)		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	sda
6)		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	sda
7)		Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)

				v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)
				vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)
				vii. Breakwater (m)
				viii. Seawall dan Bangunan pengamanan pantai lainnya (m)

2) IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km². Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. ▪ Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. ▪ Yang dimaksud dengan infrastruktur pengamanan pantai meliputi : breakwater, seawall dan lain-lain. ▪ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan

	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	---

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	1) Luas permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda	sda
	3) Luas kawasan sepanjang permukiman pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS	sda	sda

	kewenangan kabupaten/kota (ha)		
4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	sda	sda
5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	sda
6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	sda
7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m)

				ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengamanan pantai lainnya (m)
				Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3) IKK Outcome : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Rumus	:	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), dioperasikan dan pelthara (ha)}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak

	▪ Yang dimaksud dengan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi ▪ Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi ▪ Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting. ▪ Daerah yang tidak memiliki irigasi harus menyertakan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
--	--

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Ket
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1)	Persentase jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100\%$	sda
	3)	Persentase jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100\%$	sda

4) IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100\%$
Keterangan	▪ Yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum ▪ Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. ▪ Untuk data total rumah tangga (penyebut), selain proyeksi, data riil total rumah tangga di Kabupaten-Kota juga dapat digunakan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada/tidak	sda
	3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	sda
	4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk	Sda	sda

		melakukan penyelenggaraan SPAM		
	5)	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	sda	sda

5) IKK Outcome : Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan cubluk adalah tempat penampungan tinja atau disebut juga tanki septik (septic tank) ▪ Yang dimaksud dengan IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat ▪ Yang dimaksud dengan IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

	▪ Data ini bersifat Akumulatif dan Alternatif, yang artinya bisa salah satu baik Cubluk, IPLT dan IPALD, atau Ketga-tiganya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan
--	---

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Ket
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	sda	sda
	3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan	sda	sda

		pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		
4)		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	sda	sda
5)		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	sda	sda
6)		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	sda	sda
7)		Kinerja pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbagung < 25 jiwa/ha}}{\sum \text{rumah yang mempunyai tinjanya telah diolah di IPLT}} \times 100\%$	sda
8)		Kinerja pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang mempunyai tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbagung > 25 jiwa/ha}} \times 100\%$	sda

9)	Kinerja pelayanan SPALD akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD-T}} \times 100\%$	sda
10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	sda
11)	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	sda
12)	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	sda
13)	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	Sda
14)	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	sda

6) IKK Outcome : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	: Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$
Keterangan	: ▪ Seluruh Jenis IMB Baik Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi}}{\text{Jumlah bangunan gedung}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Sudah cukup jelas	sda
	3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	Sda
	4) Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	sda

5)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sudah cukup jelas	sda
6)	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	sda	sda
7)	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	sda	sda
8)	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	sda	sda

7) IKK Outcome : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kemantapan jalan
Rumus	:	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan kesetruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah panjang jalan dan jembatan ▪ Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	sda
	3) Panjang jembatan yg dibangun	sda	sda

	4)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	sda	sda
	5)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	sda	sda
	6)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	sda	sda
	7)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	sda	sda
	8)	Panjang jalan yang dipelihara	sda	sda
	9)	Panjang jembatan yang dipelihara	sda	sda

8) IKK Outcome : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}}$
Keterangan	:	Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi

	▪ Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci
--	--

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1) Jumlah Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	sda	sda
	3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	sda	sda
	4) Terselenggaranya Sistem Informasi	Ada/tidak	sda

		Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		
5)		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	sda	sda
6)		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	sda	sda
7)		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah	sda	sda

		kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		
	8)	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	sda	sda
	9)	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	sda	sda
	10)	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis/analisis konstruksi di wilayah	sda	sda

		kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		
	11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	sda	sda

12)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	sda	sda
13)	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	sda	sda
14)	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda	sda
15)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	sda	sda

		usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
16)		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	sda
17)		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	sda

	18)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	sda	sda
	19)	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	sda	sda
	20)	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	sda	sda
	21)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	sda	sda
	22)	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	sda	sda
	23)	Jumlah pengawasan terkait	sda	sda

		ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		
24)		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda	sda
25)		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang		

	menjadi kewenangan pengawasannya	
--	-------------------------------------	--

9) IKK Outcome : Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Rumus	:	$\frac{\text{jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per jenis Konstruksi

